

PERAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA *CENTRE POINT OF INDONESIA DI KOTA MAKASSAR*)

Mutiasari Saputri¹, Putri Robiatul Adawiyah²

Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

mutiasarisaputri25@gmail.com

[om.](mailto:putri.ra@unmuhjember.ac.id)

putri.ra@unmuhjember.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Center Point of Indonesia merupakan salah satu ikon Sulawesi Selatan, lebih tepatnya Kota Makassar. Reklamasi dan pengembangan Center Point Of Indonesia adalah proyek besar yang memiliki dampak yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan peran badan perencanaan dan pembangunan dalam kebijakan penataan ruang dan wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di titik pusat Indonesia Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Partisipasi pihak berwenang. Ada banyak pihak yang terlibat dalam kebijakan penataan ruang di Indonesia Centrepoin, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi ini sangat penting untuk menciptakan rencana yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang komprehensif, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, diintegrasikan ke dalam kebijakan perencanaan tata

ruang saat ini, yang menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

Kata Kunci : Peran, Tata Ruang Wilayah, dan Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

Center Point of Indonesia is one of the icons of South Sulawesi, more specifically Makassar City. The reclamation and development of Center Point Of Indonesia is a major project that has a major impact on various aspects of human life. The aim of this research is to determine and explain the role of planning and development agencies in spatial and regional planning policies from a sustainable development perspective in Indonesia's central point, Makassar City. This research uses a qualitative descriptive research type. The results of this research are Participation of authorities. There are many parties involved in spatial planning policy at Indonesia Centrepoin, including the government, community and private sector. This participation is critical to creating a plan that is comprehensive and responsive to community needs. Comprehensive policies, as well as sustainable development principles such as environmental protection and wise management of natural resources, are integrated into current spatial planning policies, demonstrating commitment to achieving sustainable development goals

Keywords: Role, Regional Spatial Planning, and Sustainable Development

Pendahuluan

Center Point Of Indonesia (CPI), merupakan salahsatu megaprojek yang akan dibangun di selatan Sulawesi. CPI akan memberi Makassar area yang luar biasa untuk digunakan sebagai pusat bisnis, wisata, dan rekreasi. Konstruksinya yang luar biasa pasti menimbulkan banyak masalah dan kritik, termasuk anggaran yang besar dan pembebasan lahan, yang sering menjadi masalah utama. Banyak orang terus mengkritiknya selama proses pembangunan, bahkan beberapa menganggapnya sebagai alat politik dan jualan politik untuk kepentingan Pilkada Gubernur yang baru dimulai. Proyek besar ini kemudian



dipaksakan untuk selesai atau setidaknya terlihat sedang berjalan agar masyarakat tidak menganggapnya gagal.

Di antara banyak inisiatif reklamasi pantai di Indonesia, ada beberapa yang membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daripada yang lainnya. Salah satu contohnya adalah proyek reklamasi di Pusat Pusat Indonesia (CPI) di Kota Makassar. Pemerintah Provinsi dan PT Ciputra bekerja sama untuk menjalankan proyek ini sesuai dengan kewenangan mereka. Sebenarnya, inisiatif ini sangat menguntungkan karena akan memberikan Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan ikon baru sebagai kota yang terkenal di seluruh dunia. Namun demikian, masyarakat menentang proyek tersebut, terutama nelayan karena takut kehilangan pekerjaan mereka. Proyek Centre Point Of Indonesia ini dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri, bersama dengan Ciputra Grup. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 252/VII/PEMPROV/2013 dan Nomor 231/YBA/VII/2013 antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT. Yasmin Bumi Asri tentang Reklamasi Kawasan Pusat Poin Indonesia di Makassar, Pemprov Sulsel akan menerima sekitar 50 hektar lahan reklamasi sebagai bagian dari pengembangan kawasan Pusat Poin Indonesia. Karena itu, pemerintah provinsi menandatangani kontrak kerja sama dengan investor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian akan dilakukan pada tahun 2024 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Mereka juga menyelidiki bagaimana pemerintah membuat dan menerapkan kebijakan untuk mendukung program ini di pusat kota Indonesia. Untuk penelitian ini, saya melakukan wawancara dengan tiga narasumber: Kepala Bappeda, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan. Data utama dari penelitian ini diperoleh dari situs web resmi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.

Tinjauan Pustaka

“Penerapan Kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan” merupakan kajian yang dilakukan oleh Darmawati, Choirul Saleh dan Imam Hanafi dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi temuan penelitian di lapangan yang didasarkan pada konsep atau teori faktual dan diterapkan pada permasalahan yang diteliti guna menemukan jawaban dan penjelasan yang utuh. Hal ini juga menyoroti sejumlah permasalahan yang belum ditangani oleh pihak eksternal dan harus ditangani untuk meningkatkan implementasi kebijakan dan mencapai tujuan peraturan daerah RTRW. Untuk melaksanakan kebijakan peraturan daerah RTRW Kota Palopo digunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Edwar III (1980) yang lebih dikenal dengan model dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi. Model tersebut mencakup empat proses: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil dan Pembahasan

Menurut penelitian tentang model motivasi kerja dan kepemimpinan, kinerja pegawai di Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh keduanya. Melalui kepemimpinan yang efektif dan motivasi yang tinggi, kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Penelitian tentang Koordinasi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penelitian menunjukkan bahwa bekerja sama dengan baik dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dapat meningkatkan komitmen organisasi dan membuat APBD lebih efektif.

Kota Makassar terletak di dekat pantai dan memiliki koridor barat dan utara yang membentang ke pantai. Banyak sungai mengalir ke dalam kota, seperti Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang. Kota Makassar terletak pada ketinggian 0-25 meter dari permukaan laut. Batas wilayah Kota Makassar secara administratif adalah sebagai berikut: Kota Makassar terletak di bagian selatan Pulau



Sulawesi, di antara Kabupaten Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Timur, Kabupaten Gowa Selatan, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar Barat. Pembangunan Kota Makassar dimulai di pesisir pantai yang diapit oleh di Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan membantu urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Bagian ini juga bertindak sebagai perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di bidang ini. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh kepala badan, yang berkedudukan di bawah gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala badan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, kewilayahan, dan infrastruktur, serta penelian dan pengembangan. sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019, seperti yang diubah oleh Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016.

Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua pemangku kepentingan dipertimbangkan, proses perencanaan melibatkan masyarakat, menurut hasil wawancara. Untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat lokal, konsultasi publik dan forum diskusi digunakan. Pengaturan Penggunaan Area: Kebijakan zonasi lahan yang jelas mencegah perselisihan antara perumahan, sektor komersial, dan ruang hijau terbuka. Pembuat undang-undang memastikan bahwa pembangunan tidak melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, penting untuk menggabungkan elemen lingkungan, seperti menjaga ruang terbuka hijau dan ekosistem lokal. Proyek yang sedang di Konstruksi Infrastruktur Terintegrasi adalah proyek pengembangan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Indonesia Center Point. Rencana transportasi yang efektif untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Proses observasi dan evaluasi rutin dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan kebijakan tata ruang. Penyesuaian kebijakan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan komentar masyarakat. Penegakan hukum menghadapi masalah terkait pelanggaran tata ruang, seperti pembangunan ilegal; masalah anggaran yang mengganggu proyek yang direncanakan; dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik dan fasilitas umum yang memadai. Ini membuat kawasan Pusat Point Indonesia lebih menarik untuk investasi dan wisatawan. Dilaksanakan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon.

Simpulan

Keterlibatan pihak berwenang: Di Centre Point of Indonesia, berbagai sektor swasta, publik, dan pemerintah terlibat dalam penerapan kebijakan tata ruang. Untuk membuat rencana yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, keterlibatan ini penting. Kebijakan tata ruang saat ini menggabungkan kebijakan yang menyeluruh dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan perlindungan lingkungan. Ini menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan Penggunaan Area: Meskipun masih ada masalah untuk menangani pelanggaran, peraturan penggunaan lahan diterapkan dengan baik. Zonasi yang jelas memungkinkan pembangunan ke arah yang lebih terencana. Pembangunan berkelanjutan meningkatkan kualitas hidup, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat di Pusat Point Indonesia.

Daftar Pustaka

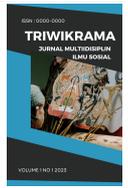
- Attahmid, Andi Nur Achsanuddin Usdyn. "Pengaruh Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) Terhadap Perekonomian Masyarakat Pesisir di Kecamatan Mariso Kota Makassar." *Jurnal Economic Resource* 1.1 (2018): 60-70.
- Sarah, Yuni, et al. "Reklamasi Centre Point of Indonesia di Kawasan Pantai Losari: Ombak Perubahan Bagi Masyarakat Sekitar." *JESD: Journal of Education Social and Development* 2.1 (2023): 304-308.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 4 No 7 Tahun 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Thamrin, Aldy Rafzanjani, Andi Muhibuddin, and Syahriar Tato. "DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN CENTER POINT OF INDONESIA (CPI)." (2023).

Rahmasari, Shinta Aurelia, and Itok Wicaksono. "Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Jember Dalam Upaya Percepatan Pencapaian Target Sustainable Development Goals." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember* (2022).